

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Konvensi Jenewa melindungi Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam suatu konflik bersenjata serta pertanggungjawaban hukum yang harus ditempuh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*). Dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa di dalam Konvensi Jenewa 1949 masih terdapat beberapa ketentuan yang seharusnya dimuat dalam konvensi tersebut dalam menjamin hak mereka ketika mereka menggunakan senjata maupun menjadi objek sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa Konvensi Jenewa 1949 belum optimal menjamin perlindungan Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB. Serta negara yang bertanggungjawab atas serangan yang dilakukan terhadap personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional PBB. Bentuk-bentuk tanggung jawab negara terdapat dalam *Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes against Humanity* (Konvensi tentang Keterbatasan-keterbatasan Ketertiban terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan) 1968 dan terdapat dalam Statuta Roma 1998. Pada kasus penyerangan personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional PBB, dapat diberlakukan Yurisdiksi ICC yang berfungsi sebagai pelengkap atau *complementarity* ketika Mahkamah Nasional menyatakan tidak mau (*unwilling*) dan atau tidak mampu (*unable*).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional, Konvensi Jenewa 1949.

ABSTRACT

This study aims to observe how the Geneva Conventions protect United Nations peacekeeping and international security personnel in an armed conflict as well as legal accountability that must be taken. As a normative juridical research, this study uses statutes, case, and conceptual approach. It is found that in the Geneva Conventions of 1949 there are still some provisions that should be contained in the convention in guaranteeing their rights when they use weapons or become target objects. This suggests that the 1949 Geneva Conventions have not optimally guaranteed the protection of unification and international security personnel. As well as the country responsible for the attacks carried out on U.N. peacekeeping and international security personnel. Forms of state responsibility are contained in the Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes against Humanity 1968 and contained in the Rome Statute of 1998. In the case of attacks on UN peacekeeping and international security personnel, icc jurisdictions may be enforced that serve as complementarity when the national court declares unwilling and or unable.

Keywords: Legal Protection, International Peacekeeping and Security Personnel, Geneva Convention 1949.